

PAD, DAU, DAK, DBH, LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL DAN DAMPAKNYA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI
(Studi pada Provinsi/Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali Tahun 2012-2017)

Nadiah Dwi Retno
nadiahdwi2@gmail.com

Jacobus Widiatmoko*
jwidiatmoko@edu.unisbank.ac.id
Fakultas Ekonomikaa dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang, Indonesia

ABSTRAK

Studi ini menguji pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, Area pada Pengeluaran Modal dan dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Populasi dalam penelitian ini adalah Provinsi / Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali pada tahun 2012-2017. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan periode penelitian 2012-2017 menghasilkan 96 sampel. Hubungan dan atau pengaruh antar variabel dijelaskan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAK dan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pengeluaran Modal, DAU dan DBH tidak berpengaruh terhadap Pengeluaran Modal, Pengeluaran Modal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pengujian variabel kontrol menunjukkan bahwa hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Investasi Asing Langsung memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kata kunci: Pengeluaran Modal, PAD, DAU, DAK, DBH, Area, Indeks Pembangunan Manusia, Investasi Asing Langsung, dan Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

This study examines the effect of PAD, DAU, DAK, DBH, Area on Capital Expenditures and their impact on Economic Growth. The population in this study is the Province / Region of Sumatera, Java, and Bali in 2012-2017. The sampling method uses purposive sampling with the study period from 2012-2017 producing 96 samples. The relationship and or influence between variables is explained by using the multiple regression analysis method. The results of the study show that PAD, DAK and area have a significant positive effect on Capital Expenditures, DAU and DBH have no effect on Capital Expenditures, Capital Expenditures have a significant negative effect on Economic Growth. Testing the control variable shows that the relationship between the Human Development Index has no effect on Economic Growth, while Direct Foreign Investment has a significant positive effect on Economic Growth.

Keywords: *Capital Expenditures, PAD, DAU, DAK, DBH, Area, Human Development Index, Direct Foreign Investment, and Economic Growth*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat sekaligus memberikan kebebasan pemerintah daerah untuk mengelola

dan merencanakan anggaran keuangannya sendiri serta membuat kebijakan – kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap kemajuan daerahnya. Maka untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan pendanaan yang bersumber dari pendanaan daerah yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Susunan APBD pada realisasi penerimaan terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,

Dana Bagi Hasil yang dapat dijadikan sebagai faktor dalam mempengaruhi Belanja Modal. Selain penerimaan terdapat juga pengeluaran yang diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik, belanja transfer, belanja tak terduga dan Belanja Modal (Suparmoko, 2002). Berdasarkan klasifikasi belanja daerah tersebut pemerintah daerah hanya terfokus pada belanja daerah yang bersifat jangka pendek atau dapat dikatakan kurang produktif yaitu belanja operasi yang meliputi belanja rutin dan belanja pegawai. Justru Belanja Modal yang memiliki pengaruh penting terhadap Pertumbuhan Ekonomi oleh pemerintah daerah kurang diperhatikan, ditunjukkan dengan rata-rata presentase rasio Belanja Modal diseluruh provinsi masih dibawah 45% karena proporsi Belanja Modal yang dianggarkan cukup rendah (Widiasih dan Gayatri, 2017).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi penelitian akan lebih terfokus dalam membahas mengenai Belanja Modal sebagai syarat utama memberikan pelayanan publik. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perekonomian daerah dengan beberapa faktor tambahan yang dapat mempengaruhi Belanja Modal yaitu Luas Wilayah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat Belanja Modal, maka akan berdampak pula pada Pertumbuhan Ekonomi dan Sebagai penentu pertumbuhan ekonomi, variabel kontrol diperlukan dalam penelitian sebagai pengendalian antara variabel independen dan variabel dependen agar tidak dipengaruhi oleh faktor luar lainnya. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penanaman Modal Asing Langsung. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penelitian yang berjudul **Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi** perlu dilakukan.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Stewardship

Teori *stewardship* didefinisikan sebagai situasi dimana manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan keinginan pemilik karena tujuan utama dari *steward* yakni berperilaku untuk kepentingan bersama dan berusaha untuk dapat mencapai tujuan organisasi dengan asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik (Raharjo, 2007).

Teori *stewardship* pada konteks sektor publik, pemerintah bertindak sebagai *steward* yaitu bertugas mengelola sumber daya sedangkan rakyat selaku *principal* atau pemelik sumber daya sehingga pemerintah akan berusaha memaksimalkan pelayanan public untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai wujud tercapainya tujuan pemerintah dan masyarakat sebagai publik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2002) yaitu pajak dan retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah sangatlah penting bagi pengeluaran Belanja Modal, karena apabila Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari saluran masyarakat melalui pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain meningkat maka Belanja Modal sebagai fasilitas masyarakat juga akan meningkat selaras dengan tujuan dari pemerintah daerah yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik dan dapat mensejahterakan masyarakat. Penelitian Permatasari dan Mildawati (2016), Heliyanto dan Handayai (2016) menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Menurut peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan pelayanan publik. Setiap transfer Dana Alokasi Umum yang diterima daerah bersifat *Block Grant* yang akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah termasuk untuk Belanja Modal, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana pendapatan secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer Dana Alokasi Umum yang diterima daerah lebih besar. Penelitian Mutiah (2015), Sudika dan Budiarta (2017) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus juga berasal dari APBN dan dialokasikan setiap daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah yang bersifat khusus sesuai dengan komitmen atau prioritas nasional. Pengaturan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik dapat meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung laju Pertumbuhan Ekonomi yang sesuai dengan amanat peraturan menteri keuangan tersebut yang diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan alokasi belanja pembangunan infrastrukturnya lebih tinggi dengan pendanaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut tentunya akan berimbas pada

peningkatan pengalokasian belanja untuk fisik yang dalam APBD terakomodir dalam jenis barang modal. Penelitian Sudika dan Budiarta (2017), Heliyanto dan Handayani (2016) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H3: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Widiasih dan Gayatri, 2017). Dana Bagi Hasil dapat digunakan sesuai kegiatannya dengan menerapkan teori *stewardship* dalam pelaksanaannya yaitu pemerintah bertindak sebagai *steward* dengan tujuan memuaskan pemilik dengan kata lain yang dimaksud yaitu mensejahterakan masyarakat dengan adanya pelayanan publik berupa penambahan aset atau Belanja Modal. Penelitian Permatasari dan Mildawati (2016) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H4: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal

Luas wilayah pemerintahan merupakan jumlah ukuran besarnya wilayah dari suatu pemerintahan, baik itu pemerintahan Kabupaten, Kota maupun geografis suatu daerah (Afkarina dan Hermanto, 2017). Pemerintah daerah mengindikasikan salah satu sumber pendanaan Belanja Modal untuk pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yaitu Luas Wilayah. Maka, sarana dan prasaran yang tersedia pasti akan semakin

banyak apabila daerah memiliki wilayah yang luas dibandingkan dengan daerah yang memiliki Luas Wilayah relatif kecil. Penelitian Afkarina dan Hermanto (2017) menunjukkan bahwa Luas Wilayah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

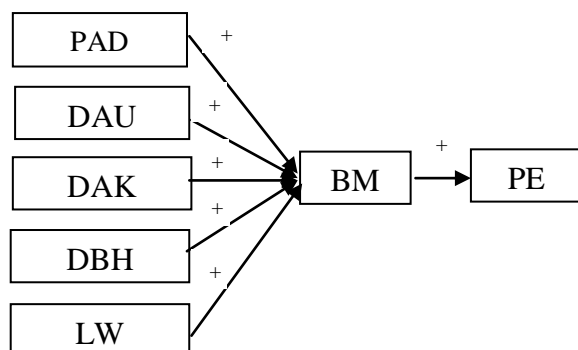
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H5: Luas Wilayah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja Modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Peningkatan Belanja Modal dapat memberikan dampak pada Pertumbuhan Ekonomi di suatu daerah. Maka, jika pada suatu daerah Belanja Modal meningkat maka Pertumbuhan Ekonomi dapat diupayakan berkembang dengan pengalokasian Belanja Modal untuk investasi maupun pembangunan. Penelitian Kolawole dan Odubunmi (2015) menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H6: Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi selama periode 2012-2017 sebanyak 10 provinsi di wilayah Sumatera, 6 provinsi di wilayah Jawa, dan 1 provinsi di wilayah Bali sehingga total populasi sebanyak 17 provinsi dengan jumlah interval selama 6 tahun sehingga diperoleh jumlah keseluruhan populasi sebanyak 102 populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu agar mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Beberapa kriteria dan pertimbangan yang dijadikan dasar penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tersedia data PDRB atas harga konstan Tahun 2012-2017 untuk setiap provinsi di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali.
2. Memiliki data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi periode 2012-2017.
3. Memiliki data Luas Wilayah, Penanaman Modal Asing Langsung (PMA), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2012-2017 untuk setiap provinsi di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali.
4. Menggunakan mata uang rupiah untuk PAD, DAU, DAK, DBH, dan Penanaman Modal Asing Langsung (PMA).

Jika terdapat data yang tidak sesuai dengan kriteria, maka data tersebut akan dikeluarkan dari sampel.

Jenis, Sumber dan Teknik Pengambilan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengambilan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi, yang dapat diakses dari

www.bps.go.id atau mendatangi langsung kantor Badan Pusat Statistik (BPS).

Definisi Operasional dan Pengukuran

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Permatasari dan Mildawati, 2016). Nilai Pendapatan Asli Daerah telah diukur dan disajikan dalam rupiah pada laporan realisasi APBD milik perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Widiasih dan Gayatri, 2017). Nilai Dana Alokasi Umum telah diukur dan disajikan dalam rupiah pada laporan realisasi APBD milik perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus daerah dengan prioritas nasional (Heliyanto dan Handayani, 2016). Nilai Dana Alokasi Khusus telah diukur dan disajikan dalam rupiah pada laporan realisasi APBD milik perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Permatasari dan Mildawati, 2016). Nilai Dana Bagi Hasil telah diukur dan disajikan dalam rupiah pada laporan realisasi APBD milik perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS).

Luas Wilayah

Luas wilayah pemerintahan merupakan jumlah ukuran besarnya wilayah dari suatu pemerintahan, baik itu pemerintahan Kabupaten, Kota maupun geografis suatu daerah (Afkarina dan Hermanto, 2017). Luas Wilayah diukur dalam km² dari data publikasi Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002-2016 milik perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS).

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi (Widiasih dan Gayatri, 2017). Belanja modal telah diukur dan disajikan dalam rupiah pada laporan realisasi APBD milik perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan proses perubahan pertumbuhan perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Nurzen dan Riharjo, 2016). Rumus Pengukuran Nilai Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut :

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}}$$

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan data PAD yang paling rendah sebesar 438.373.573.000 yaitu Provinsi Lampung pada tahun 2012, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 18.081.123.740.000 pada Provinsi Jawa Barat tahun 2017, memiliki nilai rata-rata sebesar 4.437.273.655.645,83. Dengan deviasi standar sebesar 4.613.351.437.134,230 (dapat dilihat pada tabel 1).

Berdasarkan data DAU yang paling rendah sebesar 460.857.807.000 yaitu pada Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2012, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 3.803.428.371.000 yaitu pada Provinsi Jawa Timur tahun 2017, memiliki nilai rata-rata sebesar 1.183.166.297.343,75. Dengan deviasi

standar sebesar 576.571.443.304,869 (dapat dilihat pada tabel 1).

Berdasarkan data DAK yang paling rendah sebesar 10.601.213.000 yaitu pada Provinsi Banten pada tahun 2013, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 9.118.920.858.000 yaitu pada Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017, memiliki nilai rata-rata sebesar 7.777.587.311.447,92. Dengan deviasi standar sebesar 1.750.469.468.777,930 (dapat dilihat pada tabel 1).

Berdasarkan data DBH yang paling rendah sebesar 61.311.708.000 yaitu pada Provinsi Bengkulu pada tahun 2017, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 3.367.086.540.000 pada Provinsi Riau tahun 2014, memiliki nilai rata-rata sebesar 716.645.147.812,50. Dengan deviasi standar sebesar 715.239.777.089,551 (dapat dilihat pada tabel 1).

Berdasarkan data LW yang paling rendah sebesar 3.133 yaitu pada Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2012-2015, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 91.592 pada Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2015, memiliki nilai rata-rata sebesar 38.459,23. Dengan deviasi standar sebesar 27.454,132 (dapat dilihat pada tabel 1).

Berdasarkan data BM yang paling rendah sebesar 188.754.157.000 yaitu pada Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 3.090.055.684.000 pada Provinsi Jawa Timur tahun 2017, memiliki nilai rata-rata sebesar 1.064.225.387.979,17. Dengan deviasi standar sebesar 694.939.033.962,173 (dapat dilihat pada tabel 1).

Berdasarkan data IPM yang paling rendah sebesar 64,87 yaitu pada Provinsi Lampung pada tahun 2012, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 78,89 yaitu pada Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2017, memiliki nilai rata-rata sebesar 69,9166. Dengan deviasi standar sebesar 2,783 (dapat dilihat pada tabel 2).

Berdasarkan data PMA yang paling rendah sebesar 240.092.000 yaitu pada Provinsi Bengkulu pada tahun 2014, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 86.845.406.100 yaitu

pada Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013, memiliki nilai rata-rata sebesar 13.078.678.535.416,70. Dengan deviasi standar sebesar 192.286.556.939.861,400 (dapat dilihat pada tabel 2).

Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan uji normalitas yaitu uji *Skewness* dan *Kurtosis*. Jika nilai *skewness* / *kurtosis* dibagi *standard error skewness/ kurtosis*. *Ratio Skewness / kurtosis* berada antara $\pm 1,96$ pada signifikansi 0,05, maka nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil output uji normalitas dengan menggunakan sampel (N) sebanyak 90 dan variabel dependennya pada persamaan 1 maupun persamaan 2, nilai residual masih sama-sama belum terdistribusi secara normal maka perlu dilakukan outlier dengan sisa sampel (N) sebanyak 86 dan variabel dependennya untuk persamaan 1 maupun persamaan 2. Hasil yang diperoleh pada persamaan 1, nilai *skewness* sebesar 1,731 nilai tersebut $-1,96 < 1,731 < +1,96$ dan nilai *kurtosis* sebesar 0,222 nilai tersebut nilai tersebut $-1,96 < 0,222 < +1,96$ sedangkan pada persamaan 2, nilai *skewness* sebesar -0,403 nilai tersebut $-1,96 < -0,403 < +1,96$ nilai *kurtosis* sebesar -0,706 nilai tersebut nilai tersebut $-1,96 < -0,706 < +1,96$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang diolah memenuhi asumsi normalitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan tabel 10 (persamaan 1) dan 11 (persamaan 2), diperoleh persamaan matematis regresi linear berganda sebagai berikut:

$$BM = 3,187E11 + 0,063 PAD - 0,044 DAU + 0,187 DAK + 0,118 DBH + 7.044.116,459 LW + e$$

$$PE = 0,081 - 1,050E-14 + 0,000 IPM + 2,139E-16 PMA + e$$

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi data dilihat pada tabel 12

(persamaan 1) menunjukkan nilai Adjusted R^2 yaitu 79,4%, yang berarti variabel BM dijelaskan variabel PAD, DAU, DAK, DBH, LW sekitar 79,5% dan sisanya 20,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan ini. Jadi dapat disimpulkan persamaan penelitian ini baik. Untuk model persamaan yang kedua dapat dilihat pada tabel 13 menunjukkan nilai R Square yaitu 26,2%, yang berarti variabel PE dijelaskan variabel BM, IPM, PMA sekitar 26,2% dan sisanya 73,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan ini. Jadi dapat disimpulkan persamaan penelitian ini layak.

Uji Statistik F

Hasil Anova atau F test persamaan 1 data dapat dilihat pada tabel 14 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 jauh lebih kecil dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau variabel independen PAD, DAU, DAK, DBH, LW berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu BM. Hasil Anova atau F test persamaan 2 data dapat dilihat pada tabel 15 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 jauh lebih kecil dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau variabel independen BM, IPM, PMA berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen yaitu PE.

Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel 10 (persamaan 1) dan tabel 11 (persamaan 2) diatas menunjukkan bahwa :

a. PAD

Berdasarkan hasil tabel nilai probabilitas sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga H_1 **diterima**. Dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap BM.

b. DAU

Berdasarkan hasil tabel nilai probabilitas sebesar 0,663 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 sehingga H_2 **ditolak**. Dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap BM.

c. DAK

Berdasarkan hasil tabel nilai probabilitas sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga H_3 **diterima**. Dapat

disimpulkan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap BM.

d. DBH

Berdasarkan hasil tabel nilai probabilitas sebesar 0,169 jauh lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 sehingga H_4 **ditolak**. Dapat disimpulkan bahwa DBH berpengaruh positif tidak signifikan terhadap BM.

e. LW

Berdasarkan hasil tabel nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga H_5 **diterima**. Dapat disimpulkan bahwa LW berpengaruh positif signifikan terhadap BM.

f. BM

Berdasarkan hasil tabel nilai probabilitas sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05, namun dengan nilai koefisien regresi $-1,050E-14$ sehingga H_6 **ditolak**. Dapat disimpulkan bahwa BM berpengaruh negatif signifikan terhadap PE.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran Belanja Modal juga akan mengalami peningkatan.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Heliyanto dan Handayai (2016) menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Nurzen dan Riharjo (2016) yang mengungkapkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah yang

mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang besar akan cenderung memiliki Belanja Modal yang rendah. Hal ini terjadi karena Dana Alokasi Umum (DAU) lebih digunakan untuk membiayai belanja operasi seperti belanja pegawai dan belanja barang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun hasil tersebut berlawanan dengan hasil penelitian dari Sudika dan Budiarta (2017) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Pengaturan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik dengan tujuan dapat meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung laju Pertumbuhan Ekonomi, maka Pemerintah Daerah dapat meningkatkan alokasi belanja pembangunan infrastrukturnya lebih tinggi dengan pendanaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut tentunya akan berimbas pada peningkatan pengalokasian belanja untuk fisik yang dalam APBD terakomodir dalam jenis barang modal (Heliyanto dan Handayani, 2016).

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sudika dan Budiarta (2017), menunjukan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Permatasari dan Mildawati (2016), yang mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini

menjelaskan bahwa Pemerintah daerah yang mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang besar akan cenderung memiliki Belanja Modal yang rendah. Hal ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa Belanja Modal tidak dipengaruhi dari sumber penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) karena Pemerintah daerah kurang dapat menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) secara maksimal dan tidak menggunakannya sesuai dengan kegiatan untuk dapat meningkatkan pemberian pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui Belanja Modal. Hal ini memberikan kesimpulan jika anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) meningkat maka alokasi Belanja Modal belum tentu mengalami peningkatan pula.

Hasil penelitian di atas diketahui bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil Penelitian tersebut berlawanan dengan Penelitian Permatasari dan Mildawati (2016) yang menunjukan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Heliyanto dan Handayani (2016) yang mengungkapkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal

Penelitian ini menunjukkan bahwa Luas Wilayah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Pemerintah daerah mengindikasikan salah satu sumber pendanaan Belanja Modal untuk pelayanan publik yaitu Luas Wilayah, hal tersebut sesuai dengan konsep teori *stewardship* yang juga mengindikasikan Luas Wilayah dianggap dapat meningkatkan pelayanan publik dengan penyediaan sarana dan prasarana pada setiap wilayah secara efektif.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Afkarina dan Hermanto (2017) menunjukan bahwa Luas Wilayah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Alfasadun dan Hardingsih (2017) yang mengungkapkan bahwa

Luas Wilayah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian di atas diketahui bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil tersebut mengindikasikan semakin tinggi Belanja Modal tidak akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, hal ini disebabkan karena Pemerintah masih menghadapi masalah penyerapan anggaran yang tidak sesuai jadwal dan target, serta tidak mampu direalisasikan dengan baik karena pembangunan infrastruktur selalu menumpuk menjelang akhir tahun. Belanja Modal tersebut juga dirasa kurang efektif karena bukan untuk membangun infrastruktur dasar, tetapi membangun bangunan yang kurang bermanfaat untuk mobilitas barang dan jasa.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurhidayati Islamiah (2015) menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Namun hasil tersebut berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Kolawole dan Odubunmi (2015) yang mengungkapkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

SIMPULAN, KETERBATASAN, IMPLIKASI

Simpulan

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
4. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Belanja Modal.
5. Luas Wilayah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
6. Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel kontrol berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
8. Penanaman Modal Asing Langsung (PMA) berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- 9.

Keterbatasan Penelitian

1. Angka yang digunakan untuk pengukuran Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan nilai PDRB pada tahun 2016 masih dalam angka sementara dan tahun 2017.
2. Besarnya nilai Adjusted R² pada persamaan kedua yang dijelaskan hanya sebesar 26,2%.
3. Studi yang digunakan dalam penelitian hanya berfokus pada Sumatera, Jawa, Bali.

Implikasi

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah provinsi terutama bagi provinsi di Sumatera, Jawa, dan Bali dengan menggunakan seluruhnya data riil.
2. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Luas Wilayah memiliki pengaruh yang bermakna terhadap Belanja Modal, sehingga pemerintah harus mempertimbangkan besarnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan mengembangkan Luas Wilayah agar Belanja Modal juga semakin besar.
3. Bagi Pemerintah dapat membenahi masalah realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan jadwal dan target untuk pembangunan infrastruktur dengan baik dan memaksimalkan kinerja Belanja Modal serta mendukung Pertumbuhan Ekonomi sesuai dengan birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkarina, Zia dan S. B. Hermanto. 2017. Pengaruh PAD, DAU, SILPA dan uas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol 6 (8), ISSN: 2460-0585.*
- Alfasadun dan H. Panca. 2017. Karakteristik Daerah Terhadap Belanja Modal Dengan Pemoderasu Pertumbuhan Ekonomi.

- Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Vol 6 (1), ISSN:1979-4878.*
- Asnidar. 2018. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi terhadap Perumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika conomix, Vol 2(1).*
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul 2002. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah).* Jakarta: Salemba Empat.
- Heliyanto, Firnandi dan N. Handayani. 2016. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Vol.5(3), ISSN : 2460-0585.*
- Islamiah, Nuhidayati. 2015. Analisis Pengaruh Belanja Pembangunan/Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Economix, Vol3(1).*
- Kolawole, O. Bdan S. A. Odubunmi. 2015. Government Capital Expenditure, Foreign Direct Investment and Economic Growth Relationship in Nigeria. *Mediterranean Journal of Social Science, Vol.6(4), ISSN 2039-2117.*
- Mahmudah, Farisah dan T. W. Subroto. 2017. Pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur, *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol.5(1).*
- Mutiah, Ratna Mappanyuki. 2015. The Effect of Surplus Budget Financing, Special Allocation Fund, General Allocation Fund, Regional Revenue, and Characteristics of Government on Decision of Capital Expenditures (survey in Local Government in Indonesia). *Research Journal of Finance and Accounting, Vol 6(9), ISSN: 2222-2847.*
- Muqorrobin, Mohdan S. Ady. 2017. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol.5(3).*
- Nurzen, Miardi dan I. B. Riharjo. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.5(4),ISSN: 2460-0585.*
- Permatasari, Isti dan T. Mildawati. 2016. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/ Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.5(1), ISSN 2460-0585.*
- Putri, Zuwesty. E. 2015. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi Terhadap Perumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol.5(2).*
- Raharjo, Eko. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi, Vol.2,(1), ISSN: 1907-630.*
- Raini, M.A, L. Suzan, dan D.P.K Mahardika. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal. *E-Proceeding of Management, Vol.4 (2), ISSN : 2355-9357.*
- Santosa, A.B dan M. A. Rofiq. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Periode 2007-2010). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol.20 (2), ISSN : 1412-3126.*
- Sudika, I. K dan I. K. Budiarta 2017. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.21(2), ISSN : 2302-8556.*
- Sugiyono, P. D. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik.* Yogyakarta: Andi Offset.

- Widiasih, N.N dan Gayatri. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.18(3), ISSN :2302-8556.*
- Yuliana. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.5(1).*
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar.
- Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Admin. Bali. <https://id.wikipedia.org/wiki/Bali> . Diakses Tanggal 07 Maret 2019.
- Admin. Jawa. <https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa> . Diakses Tanggal 07 Maret 2019.
- Admin. Sumatera. <https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera> . Diakses Tanggal 07 Maret 2019.

LAMPIRAN

**Tabel 1 (persamaan 1)
Deskriptif Variabel Penelitian**

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
BM	96	188.754.157.000	3.090.055.684.000	1.064.225.387.979,17	694.939.033.962,173
PAD	96	438.373.573.000	18.081.123.740.000	4.437.273.655.645,83	4.613.351.437.134,230
DAU	96	460.857.807.000	3.803.428.371.000	1.183.166.297.343,75	576.571.443.304,869
DAK	96	10.601.213.000	9.118.920.858.000	7.777.587.311.447,92	1.750.469.468.777,930
DBH	96	61.311.708.000	3.367.086.540.000	716.645.147.812,50	715.239.777.089,551
LW	96	3.133	91.592	38.459,23	27.454,132
<i>Valid N (listwise)</i>	96				

**Tabel 2 (perasamaan 2)
Deskriptif Variabel Penelitian**

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
PE	96	-0,0073	0,0763	0,0518	0,014
BM	96	188.754.157.000	3.090.055.684.000	1.064.225.387.979,17	694.939.033.962,173
IPM	96	64,87	78,89	69,9166	2,783
PMA	96	240.092.000.000	86.845.406.100.000	13.078.678.535.416,70	192.286.556.939.861,400
<i>Valid N (listwise)</i>	96				

**Tabel 3 (Persamaan 1)
Uji Normalitas Setelah Outlier**

	<i>N</i>	<i>Skewness</i>		<i>Kurtosis</i>	
	<i>Statistic</i>	<i>Statistic</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Statistic</i>	<i>Std. Error</i>
<i>Unstandardized Residual</i>	86	0,457	0,260	0,117	0,514
<i>Valid N (listwise)</i>	86				

Tabel 4 (Persamaan 2)
Uji Normalitas Setelah Outlier

	<i>N</i>	<i>Skewness</i>		<i>Kurtosis</i>	
	<i>Statistic</i>	<i>Statistic</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Statistic</i>	<i>Std. Error</i>
<i>Unstandardized Residual</i>	86	-0,337	0,260	-0,373	0,514
<i>Valid N (listwise)</i>	86				

Tabel 5 (Persamaan 1)
Uji Multikolonieritas
Tabel 6 (Persamaan 2)
Uji Multikolonieritas

<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
<i>1 (Constant)</i>		
PAD	0,343	2,919
DAU	0,414	2,415
DAK	0,587	1,705
DBH	0,307	3,257
LW	0,462	2,165

a. *Dependent Variable: BM*

<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
<i>1 (Constant)</i>		
BM	0,720	1,390
IPM	0,990	1,010
PMA	0,720	1,389

a. *Dependent Variable: PE*

Tabel 7 (Persamaan 1)
Uji Autokorelasi

<i>Model</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	2,119

a. *Predictors: (Constant), PMA, IPM, BM*
b. *Dependent Variable: PE*

Tabel 8 (Persamaan 2)
Uji Autokorelasi

<i>Model</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	1,971

a. *Predictors: (Constant), LW, DAK, PAD, DAU, DBH*
b. *Dependent Variable: BM*

Tabel 9 (Persamaan 1)
Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

<i>Model</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
<i>1 (Constant)</i>	3,711	0,000
PAD	1,832	0,071
DAU	-1,306	0,195
DAK	0,075	0,941
DBH	2,321	0,023
LW	0,019	0,985

a. *Dependent Variable: ABRES*

Tabel 10 (Persamaan 1)
Uji Heteroskedastisitas (White)

DAK	0,408	0,685
DBH	1,849	0,068
LW	0,185	0,854

a. *Dependent Variable: U2I*

<i>Model</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
<i>1 (Constant)</i>	1,551	0,125
PAD	1,826	0,072
DAU	-1,187	0,239

Tabel 11 (Persamaan 2)
Uji Heterokedastisitas (Glejser)

el	T	Sig.
(Constant)	2,037	0,045
BM	0,667	0,507
IPM	-1,562	0,122
PMA	-1,019	0,311

a. Dependent Variable: ABRES

**Tabel 12 (Persamaan 1)
Uji Regresi dan Uji Parsial (Uji T)
Tabel 13 (Persamaan 2)
Uji Regresi dan Uji Parsial (Uji T)**

Model	Unstandardized Coefficients	t	Sig.
	B		
1 (Constant)	3,187E11	3,340	0,001
PAD	0,063	5,135	0,000
DAU	-0,044	-0,437	0,663
DAK	0,187	6,473	0,000
DBH	0,118	1,387	0,169
LW	7.044.116,459	4,087	0,000

a. Dependent Variable: BM

Model	Unstandardized Coefficients	t	Sig.
	B		
1 (Constant)	0,081	3,459	0,001
BM	-1,050E-14	-5,619	0,000
IPM	0,000	-0,871	0,386
PMA	2,139E-16	3,835	0,000

a. Dependent Variable: PE

**Tabel 14 (Persamaan 1)
Uji Koefisien Determinasi**

Model	Adjusted R Square
1	0,794

a. Predictors: (Constant),
LW, DAK, PAD, DAU,
DBH

**Tabel 15 (Persamaan 2)
Uji Koefisien Determinasi**

Model	Adjusted R Square
1	0,262

a. Predictors: (Constant),
PMA, IPM, BM

**Tabel 16 (Persamaan 1)
Uji Simultan (Uji F)**

Model	Sig.
1 Regression	0,000 ^a
Residual	
Total	

a. Predictors: (Constant),
LW, DAK, PAD, DAU, DBH
b. Dependent Variable: BM

**Tabel 17 (Persamaan 2)
Uji Simultan (Uji F)**

Model	Sig.
1 Regression	0,000 ^a
Residual	
Total	

a. Predictors: (Constant),
PMA, IPM, BM
b. Dependent Variable: PE